

[https://farid.ps/articles/apartheid\\_in\\_the\\_west\\_bank/id.html](https://farid.ps/articles/apartheid_in_the_west_bank/id.html)

# Apartheid di Tepi Barat

Dalam esai-esai sebelumnya, saya terutama berfokus pada Gaza – sebuah tempat yang kini menghadapi **bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia modern**. Skala kehancuran sangat mencengangkan: sebuah wilayah yang hanya sepertiga ukuran Hiroshima telah dibombardir dengan kekuatan ledakan yang setara dengan **tujuh bom atom**. Semua jejak peradaban manusia telah rata dengan tanah. Setidaknya **60.000 warga Palestina** telah dikonfirmasi tewas, tetapi para ahli memperkirakan jumlah korban sebenarnya bisa mendekati **400.000** – hampir **seperlima dari populasi Gaza**.

Tingkat kehancuran ini mungkin membuat beberapa orang berasumsi bahwa kehidupan di Tepi Barat, di mana tidak ada Hamas maupun perlawanan bersenjata, lebih baik – sebuah model yang diusulkan oleh Prancis dan beberapa pemerintahan Arab sebagai syarat untuk mengakui negara Palestina.

Namun, asumsi ini sangat keliru dan berbahaya.

Dalam esai ini, saya ingin membahas **kehidupan di bawah pendudukan di Tepi Barat**, bukan karena lebih tenang, tetapi karena ini adalah **sistem eliminasi yang lambat dan terencana**. Sebuah sistem yang tidak dijalankan melalui bom dan blokade, tetapi melalui birokrasi, pencurian tanah, hukum apartheid, dan kekerasan terus-menerus dari para pemukim.

## Aneksasi Merangkak

Tepi Barat awalnya dimaksudkan, menurut rencana pembagian PBB tahun 1947, untuk menjadi bagian dari negara Arab – sebuah wilayah Palestina yang berkelanjutan. Visi ini tidak pernah terwujud. Yang ada saat ini bukanlah negara yang layak atau bahkan wilayah yang koheren, melainkan sebuah kepulauan yang terfragmentasi dan semakin menyusut dari enklave-enklave Palestina di bawah berbagai tingkat kendali Israel. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kebijakan Israel selama puluhan tahun yang sengaja bertujuan untuk ekspansi teritorial permanen, pengusiran warga Palestina, dan aneksasi tanah.

Pemerintah Israel secara efektif telah membagi Tepi Barat menjadi tiga jenis wilayah:

1. **Wilayah yang secara de facto telah dianeksasi** – Wilayah ini, terutama di sekitar pemukiman Israel yang besar, berada di bawah kendali sipil dan militer penuh Israel. Mereka telah diintegrasikan ke dalam jaringan infrastruktur Israel, menerima layanan kota Israel, dan sering kali dipatroli oleh polisi Israel, bukan militer. Para pemukim di wilayah ini adalah warga negara Israel dengan perlindungan hukum penuh, hak memilih, dan kebebasan bergerak. Tetangga Palestina mereka, yang

sering kali hanya berjarak beberapa ratus meter, hidup di bawah hukum militer dan pembatasan serupa apartheid.

**2. Wilayah yang sedang mengalami pembersihan etnis aktif** – Ini adalah wilayah pedesaan Palestina yang menjadi sasaran pembongkaran, pengusiran, dan kolonisasi. Seluruh desa – seperti Khan al-Ahmar, Masafer Yatta, dan Ein Samia – menghadapi perintah pembongkaran berulang. Rumah-rumah Palestina secara rutin ditolak izin pembangunan, dinyatakan ilegal, dan dihancurkan oleh administrasi sipil Israel. Sementara itu, pos-pos Israel, yang secara teknis ilegal bahkan menurut hukum Israel, dilegalkan secara retroaktif dan dihubungkan ke jalan, air, dan listrik. Pasokan air dialihkan ke pemukim, sementara komunitas Palestina bergantung pada truk tangki. Jalan akses ditutup untuk Palestina dan ditandai sebagai “khusus untuk Israel”. Padang rumput dan kebun zaitun disita atau dibuat tidak dapat diakses. Kekerasan pemukim, sering kali dengan dukungan atau sikap acuh tak acuh dari militer, digunakan sebagai alat strategis untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

**3. Wilayah di bawah kendali nominal Otoritas Palestina (Zona A)** – Wilayah ini, yang menurut perjanjian Oslo seharusnya berada di bawah kendali sipil dan keamanan penuh Palestina, adalah enklave-enklave seperti ghetto yang dikelilingi oleh wilayah yang dikuasai Israel. Masuk dan keluar diatur oleh pos pemeriksaan Israel, penutupan, dan jam malam. Warga Palestina tidak dapat bergerak bebas antar kota seperti Ramallah, Nablus, dan Hebron tanpa melewati penghalang militer Israel. Jalan-jalan, yang dilarang untuk Palestina, memotong lanskap, menghubungkan pemukiman sambil mengisolasi kota-kota Palestina. Bahkan di Zona A, serangan Israel sering terjadi. Otoritas Palestina tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Pasukan keamanannya secara efektif direkrut untuk menekan perlawanan Palestina dan menjaga stabilitas di bawah pendudukan.

Matriks kontrol ini membentuk bentuk aneksasi merangkak. Ini tidak ditandai dengan satu undang-undang atau deklarasi, melainkan oleh ekspansi terus-menerus dari blok pemukiman, zona militer, jalan bypass, dan alat-alat birokrasi dominasi. Kehadiran Palestina menjadi tidak pasti dan sementara, sementara kehadiran pemukim Israel menjadi permanen dan terus berkembang.

Tidak ada “status quo” di Tepi Barat. Status quo adalah gerakan: sebuah gerakan lambat dan terencana menuju kendali penuh Israel dan penghapusan setiap prospek negara Palestina yang berdaulat. Setiap hari, peta berubah sedikit – satu bukit lagi disita, satu desa lagi diisolasi, satu kebun zaitun lagi dihancurkan. Ini bukan konflik yang membeku. Ini adalah proses aktif kolonisasi.

## Perjalanan di Tepi Barat: Taruhan Sehari-hari

Bagi warga Palestina di Tepi Barat, bahkan perjalanan paling rutin – ke sekolah, ke tempat kerja, ke rumah sakit, atau ke desa tetangga – bisa menjadi **ujian yang berpotensi mematikan**. Pos pemeriksaan militer Israel dan jalan bypass pemukim membagi wilayah

menjadi puluhan enklave yang terfragmentasi. Perjalanan yang seharusnya **10 menit** bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan tidak selesai sama sekali.

Perjalanan adalah **taruhan** karena:

- **Ketidakpastian pos pemeriksaan:** Ada lebih dari **500 pos pemeriksaan permanen dan ad hoc** di seluruh Tepi Barat. Setiap pos bisa ditutup tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk beberapa menit atau beberapa hari. Tentara dapat secara sewenang-wenang menahan pelancong, menggeledah kendaraan, atau menolak izin masuk tanpa penjelasan.
- **Penutupan militer:** Seluruh wilayah sering kali dinyatakan sebagai “zona militer tertutup”, sering kali sebagai respons terhadap protes atau insiden yang dipicu oleh pemukim. Selama penutupan ini, warga Palestina **terkurung di rumah mereka**, tanpa kemampuan untuk pergi bekerja, ke sekolah, atau menerima perawatan medis.
- **Jalan pemukim dan pembatasan kendaraan:** Banyak jalan di Tepi Barat disediakan **khusus untuk pemukim Israel**. Warga Palestina dilarang menggunakan dan dipaksa untuk menggunakan rute yang lebih panjang, kurang terpelihara, dan sangat diawasi. Penyitaan kendaraan dan denda adalah hal yang umum.
- **Penahanan dan penahanan sewenang-wenang:** Di pos pemeriksaan mana pun, seorang Palestina bisa **ditahan tanpa dakwaan**, terutama jika nama mereka muncul di basis data militer, yang bisa mencakup **anak di bawah umur, mahasiswa, atau aktivis**. Penahanan bisa berarti hari atau bulan di penjara militer, sering kali tanpa pengadilan.
- **Pelecehan dan penghinaan:** Tentara secara rutin memaksa warga Palestina untuk menghadapi hinaan verbal, penggeledahan yang invasif, dan penundaan berjam-jam. Tidak ada jalur hukum atau akuntabilitas untuk perlakuan ini.
- **Serangan dan penembakan:** Ada kasus-kasus terdokumentasi di mana tentara atau pemukim Israel **menembak kendaraan** yang mereka anggap mencurigakan atau yang pengemudinya dianggap tidak berhenti cukup cepat. Insiden ini sering kali berakibat fatal, dan penyelidikan – jika dibuka – jarang menghasilkan konsekuensi.
- **Kekerasan pemukim di jalan:** Pemukim secara rutin melempar batu ke kendaraan Palestina, memblokir jalan tanpa hukuman, dan bahkan menyerang kendaraan dan penumpangnya. Pasukan Israel sering kali berdiri di samping atau melindungi pemukim.

Dalam sistem yang terfragmentasi ini, **kebebasan bergerak tidak ada**. Kemampuan untuk bepergian dari satu desa ke desa lain – ke rumah sakit, untuk mengunjungi keluarga, untuk mengangkut barang – tunduk pada matriks yang terus berubah dari **perintah militer, agresi pemukim, dan kendali birokrasi**.

Ini bukan hanya ketidaknyamanan; ini adalah **sistem pencekikan yang terencana**, dirancang untuk membuat kehidupan normal tidak mungkin, mengisolasi komunitas, dan mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

## Mekanisme Pengusiran: Kekerasan Pemukim

Di Tepi Barat yang diduduki, pengusiran paksa tidak selalu terjadi melalui deklarasi resmi atau perintah militer langsung. Lebih sering, ini terjadi melalui kampanye teror yang lambat dan terencana yang diatur oleh pemukim Israel – sebuah kampanye yang ditoleransi, dilindungi, dan akhirnya didukung oleh seluruh aparat negara Israel. Kekerasan ini tidak acak. Ini sistematis, strategis, dan dirancang untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

Proses ini biasanya berlangsung dalam tiga fase eskalasi:

## **1. Intimidasi dan Penyusupan ke Rumah Pribadi**

Fase pertama sering kali dimulai dengan penyusupan tanpa izin oleh pemukim ke properti Palestina. Mereka datang di siang hari, kadang-kadang dalam kelompok, sering kali bersenjata. Mereka bisa masuk ke rumah keluarga Palestina dan duduk di ruang tamu seolah-olah itu milik mereka. Mereka makan makanan di dapur, menghina keluarga, meneriakkan hinaan rasis, menghancurkan furnitur, memecahkan jendela, menyemprotkan grafiti, atau buang air kecil di lantai. Tindakan ini sangat menghina – bukan hanya pelanggaran privasi, tetapi upaya sengaja untuk mendominasi dan menanamkan rasa takut.

Penyusupan ini bukan insiden terisolasi. Mereka berulang dan ditargetkan, dimaksudkan untuk mematahkan semangat penduduk. Pesannya jelas: “Ini bukan lagi tanahmu.” Dan warga Palestina tahu bahwa jika mereka melawan, mereka berisiko ditahan, terluka, atau lebih buruk lagi – bukan karena menolak penyusup, tetapi karena “hasutan” atau “penyerangan” terhadap pemukim.

## **2. Penghancuran Mata Pencaharian**

Jika intimidasi tidak membuat keluarga pergi, pemukim sering kali beralih ke fase berikutnya dengan menyerang mata pencaharian mereka. Mereka menebang pohon zaitun berusia puluhan tahun, simbol bukan hanya pendapatan tetapi juga warisan budaya. Mereka meracuni atau mencabut tanaman, menyebarkan kawanan ternak, mencuri atau menyembelih domba. Tangki air dan pipa irigasi – yang sangat penting di daerah pedesaan tanpa akses ke jaringan air yang dikuasai Israel – dihancurkan atau ditembak hingga berlubang. Sumur-sumur diisi dengan batu, beton, atau sampah.

Penghancuran ini bukan vandalisme acak. Ini adalah taktik untuk membuat kehidupan pertanian tidak mungkin dilakukan. Tanpa tanaman, tanpa ternak, tanpa air, keluarga Palestina terpaksa meninggalkan tanah untuk mencari mata pencaharian di tempat lain. Tujuannya bukan hanya untuk menyakiti, tetapi untuk mengosongkan tanah dari penduduknya.

## **3. Pembongkaran dan Pembakaran**

Akhirnya, ketika warga Palestina masih menolak untuk pergi, pemukim menargetkan rumah-rumah itu sendiri. Kadang-kadang mereka membawa bulldoser dan ekskavator. Kadang-kadang mereka membakar rumah-rumah di malam hari, menjebak keluarga di

dalam atau memaksa mereka melarikan diri tanpa apa-apa. Video dan kesaksian saksi mata mendokumentasikan rumah-rumah yang terbakar, barang-barang yang dicuri, dan seluruh desa yang berubah menjadi abu.

Penghancuran ini sering kali mengikuti pola yang jelas: pembakaran atau pembongkaran di satu hari, ekspansi pos pemukiman di hari berikutnya. Setelah tanah dibersihkan, pemukim masuk – mendirikan karavan, pagar, dan sinagoge. Pos-pos ilegal ini kemudian dihubungkan ke jalan, listrik, dan air. Mereka dengan cepat “dinormalisasi”, dilindungi oleh militer Israel, dan akhirnya dilegalkan secara retroaktif oleh pemerintah Israel.

## Impunitas dan Penindasan

Di setiap tahap – penyusupan ke rumah, penghancuran mata pencaharian, dan pembongkaran – pesan kepada warga Palestina sama: pergi atau hancur.

Dan dalam setiap kasus, **impunitas dijamin**. **Otoritas Palestina** tidak memiliki yurisdiksi di wilayah ini dan tidak berani menghadapi pemukim, mengetahui bahwa itu akan memicu pembalasan Israel. **Polisi dan militer Israel** sering kali menutup mata – kecuali jika warga Palestina melawan. Maka, responsnya cepat: penahanan, pemukulan, tembakan peluru tajam, razia militer. Perlawanan dikriminalisasi, sementara kekerasan pemukim dimaafkan atau diabaikan. Korban tidak memiliki akses ke keadilan.

Hasilnya adalah rezim anarki bagi pemukim dan perang hukum terhadap warga Palestina – sebuah sistem ganda dari impunitas dan penindasan. Para pemukim bertindak sebagai pelopor aneksasi, melakukan apa yang pemerintah Israel belum bisa lakukan secara terbuka: mengusir warga Palestina dari tanah mereka dengan paksa.

Ini bukan spontan atau organik. Ini adalah kebijakan. Sebuah metode. Strategi pengusiran yang dilakukan oleh warga sipil, disetujui oleh negara, dan ditegakkan oleh militer.

## Air sebagai Senjata

Air, kebutuhan paling dasar untuk kehidupan, telah menjadi alat dominasi di Tepi Barat. Meskipun taktiknya telah berkembang seiring waktu, strateginya tetap sama: membuat keberadaan Palestina tidak dapat dipertahankan. Penggunaan air sebagai senjata perang – yang dulu terbuka dan biologis, kini struktural dan infrastruktur – adalah landasan dari rezim pendudukan Israel.

## Paralel Historis: Dari Racun ke Kontrol

Di hari-hari awal Nakba, milisi dan ilmuwan Israel merencanakan dan kadang-kadang melaksanakan perang biologis terhadap warga sipil Palestina. Salah satu kasus yang paling terkenal melibatkan peracunan sumur di desa-desa Palestina dengan **bakteri tifus** untuk mencegah kembalinya pengungsi. Ini bukan mitos atau “fitnah anti-Semit” – ini adalah fakta sejarah yang terdokumentasi dengan baik. Arsip Israel mengkonfirmasi operasi ini, termasuk insiden pada **1948 di Acre dan desa Ayn Karim**, di mana sumber air sengaja diracuni.

Kengerian tindakan ini diperparah oleh gema dalam sejarah Yahudi: **Anne Frank**, seperti banyak lainnya, tidak mati di kamar gas, tetapi karena **tifus**, penyakit yang ditularkan melalui air, di Bergen-Belsen. Bawa sebuah negara yang mengklaim mewakili korban Holocaust kemudian menggunakan taktik serupa terhadap bangsa lain adalah ironi sejarah yang mengerikan.

## Taktik Modern: Vandalsme dan Pencurian

Saat ini, strategi telah bergeser dari perang biologis ke sabotase infrastruktur dan pencurian. Para pemukim, sering kali dengan impunitas dan kadang-kadang di bawah perlindungan militer, **merusak sistem air Palestina** di seluruh Tepi Barat:

- Mereka **mandi di tangki air kota**, mencemari pasokan.
- Mereka **menghancurkan pipa irigasi** dan memblokir jalur akses ke mata air.
- Mereka **menembak lubang pada tangki air di atap**, menyebabkan hilangnya ribuan liter di tengah panas musim panas yang kering.
- Mereka **mengisi sumur dengan batu, beton, atau sampah**, membuatnya tidak dapat digunakan.

Pada **Juli 2025**, pemukim **mengalihkan pasokan air dari lebih dari 30 desa Palestina dekat Ein Samia** – bukan untuk memenuhi kebutuhan kritis, tetapi untuk **mengisi kolam renang pribadi** di pemukiman terdekat. Seluruh komunitas kehilangan sumber air minum satu-satunya, sementara pemukim berenang dalam kemewahan. Ini bukan kelalaian; ini adalah pernyataan supremasi.

## Kontrol Institusional: Mekorot dan Perintah Militer

Vandalsme pemukim terjadi dalam – dan dimungkinkan oleh – sistem kontrol negara Israel yang lebih luas atas sumber daya air. Rezim ini berakar pada **Perintah Militer 158**, yang dikeluarkan beberapa minggu setelah pendudukan dimulai pada 1967. Ini mengharuskan warga Palestina untuk mendapatkan izin untuk setiap instalasi atau perbaikan air baru. Izin ini hampir tidak pernah diberikan.

**Israel mengontrol sekitar 80-85% sumber daya air Tepi Barat**, termasuk waduk air tanah utama, mata air, dan sumur. Perusahaan air nasional **Mekorot** mengawasi distribusi. Hasilnya adalah ketimpangan yang mencolok:

- **52%** air yang diekstraksi pergi ke Israel sendiri.
- **32%** pergi ke pemukiman – yang ilegal menurut hukum internasional.
- Hanya **16%** yang tersisa untuk **jutaan warga Palestina** di Tepi Barat.

Pemukiman menikmati halaman rumput hijau, peternakan yang diairi, dan kolam renang. Sementara itu, desa-desa Palestina harus menjatah air, kadang-kadang hanya menerima **20-50 liter per orang per hari**, jauh di bawah **minimum 100 liter yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia**.

## Penjarahan Waduk Air Tanah dan Ekosida

Salah satu sumber air yang paling kritis adalah **waduk air tanah pegunungan**, yang membentang di seluruh Tepi Barat dan Israel. Pengeboran dalam Israel – menggunakan teknologi canggih yang dilarang untuk warga Palestina – mengekstrak jauh lebih banyak daripada yang dapat disediakan waduk secara berkelanjutan. Eksplorasi berlebihan ini telah menyebabkan banyak **sumur Palestina mengering atau menjadi asin**, terutama di **Lembah Yordan**.

Di desa-desa seperti **Al-Auja** dan **Bardala**, pertanian tradisional menjadi hampir tidak mungkin. Ladang-ladang yang dulu subur kini tandus, dan para penggembala terpaksa menjual ternak mereka karena dehidrasi. Tanah itu sendiri sedang dibunuhi – ini adalah **ekosida**, bukan hanya apartheid.

## Kriminalisasi Air Hujan

Bahkan langit pun tidak bebas. **Pengumpulan air hujan**, sebuah praktik berusia berabad-abad di komunitas pertanian Palestina, sering kali dikriminalisasi. Warga Palestina yang membangun tangki atau mengumpulkan air hujan tanpa izin menghadapi **perintah pembongkaran**, denda, atau penyitaan. Pihak berwenang Israel telah menghancurkan puluhan tangki di daerah yang dianggap “tidak diizinkan”. Dalam satu kasus terkenal, tentara **melubangi dinding tangki air hujan** di desa Badui, membiarkan air yang terkumpul mengalir ke pasir.

## Air adalah Kekuatan

Militerisasi air ini bukan tentang kelangkaan – ini tentang kekuasaan. Israel memiliki lebih dari cukup air untuk dibagi. Apa yang ditolaknya dari warga Palestina bukan hanya H<sub>2</sub>O, tetapi **martabat, keberlanjutan, dan hak untuk tetap berada di tanah mereka**. Dengan mengubah air menjadi alat kontrol dan simbol dominasi, pendudukan mengubah kehidupan sehari-hari menjadi perjuangan yang melelahkan dan memalukan untuk bertahan hidup.

Ini bukan pengelolaan lingkungan yang buruk. Ini adalah penolakan strategis – sebuah perang yang dilakukan melalui pipa dan pompa, bertujuan untuk membuat kehidupan tidak dapat dihuni bagi mereka yang dianggap tidak diperlukan.

## Transformasi Ekologi

Orang-orang Israel sering kali mengklaim hubungan leluhur yang mendalam dengan tanah, mengutip retorika Alkitab dan mempresentasikan diri mereka sebagai “pribumi yang kembali”. Namun, jejak ekologi mereka menceritakan kisah yang berbeda – kisah pengusiran yang kejam, tidak hanya terhadap manusia, tetapi juga terhadap alam itu sendiri. Lanskap dipaksa diubah untuk mencerminkan ideologi pemukiman kolonial, bukan keterkaitan otentik dengan lingkungan. Bahkan pohon-pohon menjadi saksi terhadap kebohongan ini.

## Pemusnahan Kehidupan Pribumi

Selama berabad-abad, desa-desa Palestina telah mempertahankan diri melalui pertanian yang sangat selaras dengan iklim dan medan setempat. Pohon zaitun – beberapa berusia lebih dari seribu tahun – berdiri sebagai arsip hidup dari kelanjutan dan budaya. Kebun jeruk, pohon ara, kebun delima, dan lereng bukit bertingkat mewujudkan harmoni yang rapuh antara kehidupan manusia dan ekosistem Mediterania.

Namun, setelah Nakba dan penyitaan tanah yang terus berlanjut, pohon-pohon pribumi ini **dibongkar**, sering kali secara harfiah. Dalam beberapa kasus, pembongkaran ini strategis: kebun zaitun dihancurkan untuk memberi jalan bagi pemukiman atau zona militer. Di kasus lain, mereka dihapus untuk **menyembunyikan bukti pembersihan etnis**, menyembunyikan reruntuhan rumah-rumah Palestina yang dihancurkan di bawah fasad hutan. Negara Israel dan institusi seperti **Jewish National Fund (JNF)** telah memimpin kampanye reboisasi besar-besaran, bukan dengan spesies pribumi, tetapi dengan **pinus Eropa** – yang tumbuh cepat, steril, dan asing bagi wilayah ini.

## Kolonialisme Ekologi

Pinus ini tidak menghasilkan buah. Mereka tidak dapat mendukung sistem pangan lokal, satwa liar, atau keanekaragaman hayati. Lebih buruk lagi, mereka **mengasamkan tanah** melalui getah dan daun yang jatuh, mengganggu keseimbangan nutrisi yang mendukung tanaman pribumi. Tanah yang dulunya subur menjadi tidak ramah bagi pertanian – rumput, sayuran, dan pohon pribumi seperti zaitun, carob, dan almond tidak dapat berakar.

Ini bukan hanya kebijakan lingkungan yang buruk; ini adalah **kolonialisme ekologi**, mengubah tanah untuk mencerminkan ideal Eropa, terputus dari pengetahuan lokal atau keberlanjutan. Di mana warga Palestina memelihara kehidupan, kebijakan Israel memaksakan sterilitas. Di mana lanskap dulu menawarkan makanan dan makna, kini ia menawarkan kemudahan terbakar.

## Alam Melawan

Tetapi bahkan alam pun melawan. Monokultur pinus Eropa **sangat mudah terbakar** – daun mereka yang penuh getah, cabang kering, dan pola pertumbuhan yang padat menciptakan kondisi ideal untuk kebakaran. Musim panas demi musim panas, **kebakaran hutan melanda hutan-hutan buatan ini**, mengancam tidak hanya pemukiman yang dibangun di sekitarnya tetapi juga wilayah yang lebih luas. Kebakaran ini sering kali menyebabkan **evakuasi massal** kota dan pos pemukiman, mengotori langit dengan asap, dan meninggalkan lahan luas yang terbakar dan tidak dapat digunakan.

Bencana ekologi ini mengungkapkan dasar yang tidak berkelanjutan dari transformasi lingkungan Israel. Pohon-pohon, seperti tembok dan pos pemeriksaan, dimaksudkan untuk menghapus sebuah bangsa – tetapi dengan melakukannya, mereka menciptakan kerentanan baru. Api tidak membedakan antara pemukim dan negara. Mereka melahap mitos bersama dengan hutan.

## Penyelamatan Internasional

Ketika kebakaran menjadi tidak terkendali – seperti yang terjadi di **Gunung Carmel (2010)**, **Bukit Yerusalem (2021)**, dan **Galilea (2023)** – Israel sering kali mendapatkan dirinya **memohon bantuan internasional**. Negara yang sama yang memberlakukan blokade di Gaza dan menganeksasi tanah Palestina tanpa penyesalan dengan cepat meminta **pesawat pemadam kebakaran, peralatan, dan bantuan** dari pemerintah asing. Ironi ini mengejutkan: kebijakan yang merusak tanah dan mengusir rakyatnya juga **melemahkan ketahanan negara itu sendiri**.

## Kebijakan Tanah Hangus

Penggantian ekologi pribumi dengan ekosistem asing dan rapuh adalah metafora untuk seluruh proyek Zionis: sebuah ideologi pemukiman kolonial yang mencoba mencangkokkan dirinya ke tanah yang menolak, sebuah bangsa yang tetap bertahan, dan tatanan alam yang tidak dapat ditekan tanpa batas. Pohon-pohon bukan hanya saksi bisu. Mereka adalah korban – dan terkadang pejuang.

## Implikasi Hukum Internasional

Situasi di wilayah Palestina yang diduduki tidak hanya tidak dapat dibela secara moral – ini **secara hukum bersifat kriminal**. Menurut prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan konvensi yang mengikat, tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur merupakan **serangkaian pelanggaran serius**, yang banyak di antaranya mencapai tingkat **kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan**.

### 1. Pemindahan Populasi yang Tidak Sah

**Konvensi Jenewa Keempat (1949)**, Pasal 49(6), secara eksplisit melarang kekuatan pendudukan untuk **memindahkan bagian dari populasi sipilnya ke wilayah yang didudukinya**. Pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang menampung lebih dari 700.000 pemukim, adalah pelanggaran langsung terhadap ketentuan ini. Pemukiman ini bukan hanya “lingkungan yang dipersengketakan” – mereka adalah **kolonisasi sistematis wilayah yang diduduki**, bertentangan dengan salah satu norma paling mendasar dari hukum internasional pasca-Perang Dunia II.

### 2. Pendapat Konsultatif ICJ (2024)

Pada tahun **2024, Mahkamah Internasional (ICJ)** menerbitkan **pendapat konsultatif yang mengikat untuk Majelis Umum PBB**, yang menegaskan kembali bahwa:

- **Pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah ilegal** menurut hukum internasional;
- **Semua pemukim harus dipindahkan;**
- **Israel berutang reparasi kepada rakyat Palestina** untuk pendudukan yang berkepanjangan, penyitaan tanah, eksloitasi sumber daya, dan pelanggaran hak asasi manusia.

ICJ juga menegaskan kembali bahwa **negara pihak ketiga memiliki kewajiban hukum untuk tidak mengakui atau membantu situasi ilegal** yang diciptakan oleh kebijakan Israel. Dengan kata lain, kolusi – baik melalui perdagangan, penjualan senjata, atau perlindungan diplomatik – itu sendiri adalah pelanggaran hukum internasional.

Majelis Umum PBB mengadopsi pendapat ini dengan **majoritas yang sangat besar**, memberikan **berat hukum yang kuat** berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Meskipun pendapat konsultatif tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya, mereka **mengkodifikasi konsensus hukum internasional** dan menegaskan tanggung jawab negara di bawah perjanjian yang ada.

### **3. Eksplorasi Sumber Daya Alam yang Tidak Sah**

Menurut **Peraturan Den Haag 1907 (Pasal 55-56)** dan **Konvensi Jenewa Keempat**, kekuatan pendudukan harus bertindak sebagai **administrator sementara**, dilarang untuk **mengeksplorasi atau menghabiskan sumber daya alam secara permanen** dari wilayah yang didudukinya.

Praktik Israel – dari monopoli air Tepi Barat oleh Mekorot, hingga pembatasan akses Palestina ke waduk air tanah, hingga pengalihan sumber daya untuk penggunaan eksklusif pemukim – merupakan **penjarahan sistematis**. Penolakan air dan penghancuran sistem pertanian setara dengan **penjarahan**, sebuah kejahatan perang menurut **Pasal 8(2)(b)(xvi)** dari **Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)**.

### **4. Pengusiran Paksa dan Pembongkaran Rumah**

Hukum kemanusiaan internasional melarang **pengusiran paksa**, kecuali untuk alasan keamanan atau kemanusiaan yang mendesak, dan itu pun hanya bersifat sementara. **Statuta Roma** (Pasal 7(1)(d)) mengklasifikasikan **“deportasi atau pemindahan paksa populasi”** sebagai **kejahatan terhadap kemanusiaan**, ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematis.

Pembongkaran rutin rumah-rumah Palestina oleh Israel, perintah pengusiran di daerah seperti Sheikh Jarrah, dan pengusiran paksa di wilayah seperti Masafer Yatta – sering kali untuk memperluas pemukiman atau mendeklarasikan zona militer – **jelas masuk dalam definisi ini**.

### **5. Apartheid sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan**

Klasifikasi hukum yang paling memberatkan dari rezim Israel di Tepi Barat adalah **apartheid** – sebuah sistem **dominasi rasial yang dilembagakan**. Warga Palestina dan pemukim Israel hidup di bawah **dua sistem hukum yang sepenuhnya terpisah**:

- **Warga Palestina** tunduk pada **hukum militer Israel**, diadili di pengadilan militer, kehilangan kebebasan bergerak, dan menghadapi hukuman kolektif.
- **Pemukim**, yang sering kali tinggal hanya beberapa meter jauhnya, tunduk pada **hukum sipil Israel**, menikmati hak penuh dan perlindungan, dan bertindak dengan impunitas hampir total.

Sistem hukum ganda ini, dikombinasikan dengan pencurian tanah sistematis, segregasi, dan penekanan hak politik, memenuhi **definisi hukum apartheid** menurut:

- **Konvensi Internasional tentang Penghapusan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid (1973);**
- **Statuta Roma ICC** (Pasal 7(2)(h));
- dan **hukum kebiasaan internasional**, yang melarang diskriminasi rasial dan dominasi.

Apartheid bukan hanya tuduhan politik – ini adalah **kejahatan terhadap kemanusiaan**, dan mereka yang merancang, melaksanakan, atau mendukungnya dapat dihadapkan pada **penuntutan internasional**.

## **Kewajiban Komunitas Internasional**

Pendudukan Israel atas Tepi Barat bukan hanya sengketa politik yang belum terselesaikan. Ini adalah **usaha kriminal**, yang dipertahankan oleh kekerasan, dimungkinkan oleh jaringan hukum diskriminatif, dan didukung oleh pelanggaran prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Kerangka hukumnya jelas: apa yang terjadi adalah ilegal, dan dunia memiliki **kewajiban yang jelas**, tidak hanya untuk mengutuknya, tetapi untuk bertindak.

Ini termasuk:

- Menegakkan **resolusi PBB**;
- Mendukung **penyelidikan dan penuntutan internasional**;
- Mengakhiri **dukungan militer, ekonomi, dan diplomatik** kepada kekuatan pendudukan;
- dan Memastikan **keadilan dan reparasi** bagi rakyat Palestina.

Hukum internasional hanya bermakna jika ditegakkan. Dan di Palestina, penegakannya sudah lama tertunda.

## **Komplisitas Internasional dan Kegagalan Penegakan**

Perjuangan Palestina untuk keadilan, martabat, dan penentuan nasib sendiri sering kali disajikan sebagai konflik lokal atau regional. Pada kenyataannya, ini adalah bagian dari busur sejarah yang lebih luas – yang mencerminkan **perjuangan Pencerahan melawan absolutisme monarki** di Eropa abad ke-17 dan ke-18. Saat itu, seperti sekarang, kekuatan penguasa mengklaim **mandat ilahi** untuk memerintah, menyita, dan bahkan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Dulu, itu adalah raja-raja yang memohon kehendak Tuhan; kini, ini adalah negara yang memohon hak ilahi untuk memberlakukan kolonialisasi dan penaklukan seluruh bangsa.

Apa yang dulu disebut **hak ilahi raja-raja** telah menjadi **hak ilahi pemukim**. Tetapi tidak seperti monarki Eropa, yang sebagian besar telah menjadi peninggalan seremonial sejarah, rezim Israel atas Palestina tetap menjadi **anachronisme dominasi tanpa**

**hambatan**, terisolasi dari akuntabilitas oleh institusi yang dibuat untuk mencegah penyalahgunaan seperti itu.

## Kelumpuhan Dewan Keamanan

Menurut **Pasal 94 Piagam PBB, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSC)** memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan putusan **Mahkamah Internasional (ICJ)**. Namun, ketika ICJ, dalam pendapat konsultatifnya pada tahun 2024, menyatakan bahwa pemukiman Israel ilegal dan harus dibongkar, Dewan Keamanan tidak melakukan apa-apa. Mengapa? Karena **Amerika Serikat**, anggota tetap, terus **melindungi Israel dari segala konsekuensi** dengan menggunakan hak veto-nya.

Dekade demi dekade, AS telah **memveto puluhan resolusi** yang mengutuk pelanggaran hukum internasional oleh Israel, memblokir seruan untuk sanksi, gencatan senjata, atau bahkan investigasi independen. Ini bukan diplomasi berprinsip – ini adalah **obstruksi sistematis terhadap keadilan**. Melalui veto-nya, Washington telah mengubah Dewan Keamanan menjadi **kuburan hak-hak Palestina**.

## Kemunafikan Eropa: Jerman dan Uni Eropa

Sementara AS memainkan peran sebagai pelindung di Dewan Keamanan, **Jerman dan anggota Uni Eropa lainnya** memainkan permainan yang lebih halus. Jerman, yang dihantui oleh masa lalu Nazi-nya, telah menjadikan dukungan tanpa syarat untuk Israel sebagai **dogma negara**, bahkan ketika dukungan ini bertentangan dengan kewajiban hukumnya di bawah **perjanjian hak asasi manusia internasional** dan **Konvensi Genosida**. Sementara Israel membuat Gaza kelaparan dan mengusir warga Palestina dari Tepi Barat, Jerman menyediakan senjata, dana, dan perlindungan diplomatik – sambil bekerja di belakang layar untuk **memblokir sanksi atau pembatasan perdagangan di tingkat UE**.

Ini secara efektif telah mengubah **hukum internasional menjadi sistem apartheid itu sendiri**, di mana penegakan tidak bergantung pada tingkat keparahan kejahatan, tetapi pada identitas pelaku. Tindakan yang akan memicu **kecaman, sanksi, atau penuntutan** jika dilakukan oleh **Rusia, Iran, atau Myanmar** menjadi **disucikan** ketika dilakukan oleh Israel. Pesannya jelas: **beberapa nyawa lebih berharga daripada yang lain**, dan beberapa negara berada di atas hukum.

## Krisis Legitimasi Global

Kemunafikan ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan – tidak hanya bagi warga Palestina, tetapi juga bagi **kredibilitas sistem internasional itu sendiri**. Apa arti **Statuta Roma** jika penegakannya selektif? Apa bobot **resolusi PBB** ketika mereka ditegakkan terhadap beberapa negara, tetapi tidak terhadap yang lain? Apa harapan yang bisa dimiliki korban genosida atau apartheid ketika **negara-negara paling kuat secara terbuka melemahkan keadilan?**

Ini bukan hanya komplisitas – ini adalah **kolaborasi**. Dengan memblokir konsekuensi, pemerintah-pemerintah ini bukanlah pengamat netral, tetapi **fasilitator aktif dari kejahatan**.

## Mengakhiri Mitos Pengecualian Ilahi

Sudah saatnya untuk mengakhiri gagasan bahwa “**orang-orang pilihan Tuhan tidak bisa berbuat salah**” – sebuah mitos yang telah **diinstrumentalisasi** untuk membenarkan kolonialisasi, pengusiran massal, dan apartheid. Tidak ada negara, terlepas dari sejarah, agama, atau identitasnya, yang berhak melanggar hukum internasional, merampas hak sebuah bangsa, atau dibebaskan dari konsekuensi tindakannya.

Janji “**tidak lagi pernah**” seharusnya bersifat universal. Bukan “tidak lagi pernah untuk orang Yahudi”, tetapi **tidak lagi pernah untuk siapa pun** – selamanya. Janji ini terdengar hampa ketika digunakan untuk **membenarkan** penindasan daripada **mencegahnya**.

## Menuju Tatanan Dunia Sekuler dan Adil

Yang kita butuhkan sekarang bukanlah lebih banyak retorika, tetapi sebuah **tatanan internasional sekuler berbasis aturan**, di mana **hukum internasional diterapkan secara merata kepada semua** – termasuk sekutu, termasuk Israel, termasuk rezim pemukiman kolonial. Hanya ketika hukum ditegakkan tanpa rasa takut atau pilih kasih, keadilan bisa lebih dari sekadar slogan.

Dunia telah terlalu lama diam di Rwanda. Di Bosnia. Di Myanmar. Dan kini di Palestina. Setiap kali, institusi hukum internasional diuji. Setiap kali, kegagalan mereka ditulis dengan darah para korban.

Sejarah tidak akan memaafkan keheningan. Itu tidak akan membenarkan standar ganda. Itu tidak akan mentolerir pengecualian ilahi yang menyamar sebagai diplomasi.

Saatnya untuk bertindak – tidak hanya untuk Palestina, tetapi untuk masa depan hukum internasional itu sendiri.

## Ilusi Solusi Dua Negara

Sementara genosida di Gaza memasuki tahun kedua, banyak pemerintah di seluruh dunia telah mencoba menyelamatkan reputasi mereka dengan gerakan simbolis – yang paling menonjol adalah seruan baru untuk **mengakui negara Palestina** pada **KTT PBB di bulan September**. Namun, pengakuan yang terlambat ini, di tengah kekerasan yang menghancurkan, bukanlah tindakan serius untuk keadilan – ini adalah **gaslighting**, sebuah cara untuk **menyembunyikan kelambaban internasional dengan pernyataan kosong**.

Gagasan tentang solusi dua negara telah lama mati. Kini, itu dihidupkan kembali bukan sebagai jalan menuju perdamaian, tetapi sebagai **tabir asap** untuk memungkinkan tindakan-tindakan penghancuran terakhir Israel.

## Pengakuan dengan Syarat

Beberapa negara telah menyatakan kesediaan untuk mengakui Palestina – tetapi **hanya dengan syarat yang mengerikan**:

- **Prancis** menuntut agar **warga Palestina melucuti senjata**, secara efektif meminta sebuah bangsa yang terkepung, kelaparan, dan dibombardir untuk **menyerahkan sarana perlawanan terakhir mereka**, sementara Israel melanjutkan blokade dan pendudukannya yang ilegal.
- **Inggris** mengkondisikan pengakuan pada **kelanjutan serangan genosida Israel**, menyatakan bahwa pengakuan harus “mendukung hak Israel untuk membela diri”, bahkan ketika “pembelaan” ini berwujud **kelaparan massal, pengusiran paksa, dan pendudukan militer**.

Ini bukan pengakuan; ini adalah **penawaran paksa untuk menyerah**. Ini menuntut warga Palestina untuk menerima penaklukan, fragmentasi, dan penghancuran mereka sebagai harga untuk diakui di atas kertas – sebuah parodi kejam dari diplomasi.

Sementara itu, Israel menyerang negara-negara ini, menuduh mereka “**memberi hadiah pada terorisme**”. Tetapi ini adalah **kuali yang menuduh panci hitam**.

## Asal-Usul Teroris Negara Israel

Jika terorisme harus dikutuk, pendirian Israel harus disertakan. **Kelompok paramiliter Zionis** Irgun, Lehi (“Stern Gang”), dan Haganah – semua pendahulu Pasukan Pertahanan Israel (IDF) – melakukan gelombang serangan kekerasan selama Mandat Inggris:

- **Pengeboman Hotel King David** (1946) menewaskan 91 orang.
- **Pembunuhan utusan PBB Folke Bernadotte** (1948) oleh Lehi bertujuan untuk menghentikan upaya perdamaian.
- **Kedutaan Inggris di Roma** dibom pada 1946.
- Tak terhitung banyaknya **jembatan, pasar, dan desa-desa Arab** diserang dan dihancurkan.

Menurut standar saat ini, tindakan ini akan diklasifikasikan sebagai **terorisme** tanpa keraguan. Namun, ketika Israel muncul dari kekerasan ini, ia tidak diisolasi atau disanksi – ia **dirangkul oleh Barat**.

Pesannya jelas: **ketika Israel menggunakan kekerasan, itu heroik**; ketika warga Palestina melawan, itu terorisme. Standar ganda ini terus mendefinisikan wacana internasional.

## Menciptakan Fakta di Lapangan Sementara Dunia Berbicara

Sementara para pemimpin dunia berdebat tentang pengakuan simbolis, **Israel terus menciptakan fakta di lapangan**:

- **Pemukiman ilegal** di Tepi Barat dan Yerusalem Timur terus berkembang. Pengakuan tidak akan **secara ajaib menghilangkannya** atau mengembalikan tanah yang dicuri.
- Di Gaza, **orang-orang mati saat kita berbicara**. Klasifikasi Keamanan Pangan Terpadu (IPC) telah menyatakan **fase kelaparan 5 yang katastrofik dan tidak dapat dibalik**. Bayi, lansia, dan yang lemah mati **bukan karena kekurangan makanan, tetapi karena penolakan yang disengaja**.

Bahkan jika akses makanan tiba-tiba dipulihkan – yang tidak terjadi – **kerusakan itu tidak dapat dibalik**:

- **Otak anak-anak**, yang kekurangan nutrisi, **tidak akan pernah berkembang sepenuhnya**, menyebabkan **cacat kognitif seumur hidup**.
- **Sekolah dan universitas**, yang secara sistematis dibom, telah menghilangkan akses seluruh generasi ke pendidikan.
- **Trauma psikologis**, yatim piatu, dan amputasi massal telah menciptakan warisan penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. **Gaza kini memiliki jumlah amputasi anak tertinggi di dunia**, sebuah rekor mengerikan yang tidak seharusnya dimiliki siapa pun.

Menyarankan agar warga Palestina **melucuti senjata di hadapan ini** bukanlah proposal perdamaian – ini adalah **pakta bunuh diri**. Tidak ada bangsa di bumi yang akan setuju untuk meletakkan senjata ketika mereka secara sistematis dibiarkan kelaparan, dibom, dan dihapus.

## **Pengakuan Tidak Menghentikan Kolonisasi**

Status negara juga tidak menjamin perlindungan. **Suriah** adalah negara yang diakui ketika Israel **menduduki dan kemudian menganeksasi Dataran Tinggi Golan**. **Lebanon** dan **Iran** telah menjadi sasaran serangan udara, pembunuhan, dan sabotase Israel. **Pengakuan tidak pernah menghentikan agresi**, ketika pelaku menikmati impunitas penuh.

Dan berpura-pura bahwa Gaza dan Tepi Barat adalah dua masalah terpisah adalah sepenuhnya keliru. Mereka adalah **dua front dari perang yang sama** – sebuah perang untuk **menghapus bangsa Palestina**:

- **Gaza** menghadapi **pemusnahan melalui kelaparan dan pemboman**.
- **Tepi Barat** dicekik oleh **kekerasan pemukim, pencurian air, pendudukan militer, dan aneksasi merangkak**.

Keduanya adalah bagian dari strategi terkoordinasi untuk **eliminasi**.

## **Koeksistensi Tidak Mungkin di Bawah Dominasi**

Bagaimana dunia bisa mengharapkan warga Palestina untuk hidup berdampingan dengan mereka yang:

- Secara terbuka menyerukan pemusnahan mereka;
- Membunuh anak-anak mereka;
- Mencuri air mereka;
- dan **Membangun rumah di atas reruntuhan mereka?**

**Jika pelucutan senjata diperlukan**, itu harus dimulai dengan **Israel**, kekuatan pendudukan, pemegang senjata nuklir, dan arsitek rezim apartheid ini. Jika pemukim merasa “tidak aman” di hadapan orang-orang yang mereka usir, **mereka dipersilakan untuk kembali ke negara asal mereka.**

## Sejarah yang Dibuat-Buat

Sebelum kolonisasi Zionis, **Yahudi, Kristen, dan Muslim** hidup berdampingan selama berabad-abad di bawah **Kekaisaran Ottoman**. Koeksistensi yang rapuh ini **bukan dihancurkan oleh warga Palestina**, tetapi oleh ideologi **Zionisme politik**, yang berusaha menciptakan negara Yahudi di tanah yang sudah dihuni.

Pada **1933**, gerakan Zionis bahkan menandatangani **Perjanjian Haavara** dengan **Jerman Nazi**, memfasilitasi pemindahan ribuan Yahudi Jerman ke Palestina sebagai imbalan atas kerjasama ekonomi – sebuah pengkhianatan terhadap perlawanan anti-fasis Yahudi di Eropa.

Transformasi demografis tidaklah organik:

- **1917**: ~95% Palestina berbicara bahasa Arab; **kurang dari 1% berbicara bahasa Ibrani.**
- **1922**: ~6% berbicara bahasa Ibrani.
- **1931**: ~12%.
- **1947**: ~31%.

Ini bukan “kembalinya” – ini adalah **transformasi pemukiman kolonial**.

Seperti yang dikomentari dengan muram oleh komentator Israel **Avi Grinberg** di X:

*“Inggris: Kami akan mengakui negara Palestina pada bulan September.” “Baiklah. Pada bulan September, dengankehendak Tuhan, tidak akan ada lagi yang bisa diakui.”*

Ini adalah jalur yang kita tempuh. Dan kecuali dunia bertindak sekarang – bukan dengan kata-kata, tetapi dengan **konsekuensi** – ramalan ini mungkin menjadi kenyataan.

## Kesimpulan: Era Netralitas Telah Berakhir

Dunia berkata **“tidak lagi pernah”**. Itu seharusnya menjadi janji universal – bukan hanya untuk korban satu genosida, tetapi untuk semua bangsa, di mana saja, selamanya. Janji ini kini terbaring di reruntuhan di bawah puing-puing Gaza dan desa-desa yang dihancurkan bulldoser di Tepi Barat.

Buktinya sangat kuat. Apa yang terjadi di Palestina bukanlah “konflik”. Ini bukan “sengketa”. Ini adalah upaya sengaja dan sistematis untuk menghapus sebuah bangsa – melalui kelaparan, pengusiran, pemboman, kehancuran ekologi, dan hukum apartheid. Gaza kelaparan. Tepi Barat dihancurkan desa demi desa. Bersama-sama, mereka membentuk proyek tunggal kolonisasi dan eliminasi.

Hukum internasional jelas. ICJ telah memutuskan. Konvensi telah ditulis. Perjanjian mengikat. Yang kurang bukanlah pengetahuan – itu adalah **kemauan**. Dan tidak ada tempat kegagalan ini lebih jelas daripada di **Dewan Keamanan PBB**, yang lumpuh oleh **veto Amerika Serikat**, yang telah melindungi Israel dari akuntabilitas dan memungkinkan kejahatannya.

Tetapi masih ada jalan ke depan.

Menurut **Resolusi 377 Majelis Umum PBB (“Bersatu untuk Perdamaian”)**, ketika Dewan Keamanan gagal bertindak karena veto anggota tetap, Majelis Umum memiliki wewenang hukum untuk **mengatasi kelumpuhan ini**. Ia dapat mengadakan sesi khusus dan **merekomendasikan tindakan kolektif**, termasuk **penggunaan kekuatan**, untuk memulihkan perdamaian dan melindungi populasi yang menghadapi pelanggaran serius hukum internasional.

Majelis Umum harus menggunakan kekuatan ini **sekarang**.

Ia harus:

- **Mengakui bahwa genosida sedang berlangsung;**
- **Mengutuk rezim apartheid di Tepi Barat;**
- **Mengizinkan perlindungan militer bagi warga sipil Palestina;**
- dan **Menuntut penghentian segera blokade, pendudukan, dan ekspansi pemukiman Israel.**

Ini bukan radikal. Ini legal. Ini perlu. Dan ini sudah lama tertunda.

PBB didirikan di atas abu Perang Dunia II. Piagamnya ditulis untuk mencegah kengerian yang kini kita saksikan. Jika tidak dapat bertindak sekarang, ketika anak-anak sengaja dibiarkan kelaparan dan seluruh kota dihapus tanpa hukuman, maka ia telah gagal dalam misi dasarnya.

Komunitas internasional harus memilih: **Akankah ia berdiri di sisi hukum, keadilan, dan kemanusiaan, atau di sisi pengecualian, kemunafikan, dan genosida?**

Palestina adalah ujian. Dan sejarah sedang menyaksikan.